

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa: (1) variabel terikat yaitu Akuntabilitas (Y) sebesar 89,21% dikategorikan Sangat baik. Variabel bebas yaitu Perencanaan (X_1) sebesar 94,93%, Pelaksanaan (X_2) sebesar 85,62%, Pelaporan (X_4) sebesar 87,03% dikategorikan sangat baik sedangkan variabel Penatausahaan (X_3) sebesar 73,26% dan Pertanggungjawaban (X_5) sebesar 82,90%, dikategorikan baik. Hasil analisis deskriptif untuk variabel akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban. Hipotesis pertama bahwa variabel akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa di wilayah kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao cukup baik.
- b. Hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri (parsial) kelima variabel bebas yang terdiri dari Perencanaan (X_1) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,379 dan nilai signifikansi sebesar 0,020, Pelaksanaan (X_2) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,173 dan nilai signifikansi sebesar 0,033, Penatausahaan

(X₃) dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,554 dan nilai signifikansi sebesar 0,001, Pelaporan (X₄) dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,776 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Pertanggungjawaban (X₅) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,041 dan nilai signifikansi sebesar 0,045 dikarenakan nilai signifikansi dari kelima variabel bebas lebih kecil dari nilai alpha 0,05 maka kelima variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Wilayah Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao. Hasil analisis tersebut menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Wilayah Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.

- c. Hasil uji hipotesis (uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) semua variabel bebas yang terdiri dari Perencanaan (X₁), Pelaksanaan (X₂), Penatausahaan (X₃), Pelaporan (X₄) dan Pertanggungjawaban (X₅) dengan nilai F_{hitung} sebesar 21,852 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dikarenakan secara simultan nilai signifikansi dari kelima variabel bebas tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka kelima variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Wilayah Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao. Hasil analisis tersebut menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Wilayah Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.

Kontribusi atau sumbangan kelima variabel bebas dalam penelitian ini terhadap tidak stabilnya Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Wilayah Kecamatan Pantai Baru sebesar 63,1 %, sedangkan sisanya sebesar 36,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada Manajemen pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao disarankan untuk :

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan meningkatkan penatausahaan. Peningkatan penatausahaan dapat dilakukan dengan melakukan pengontrolan terhadap pencatatan pada setiap transaksi melalui aplikasi Siskeuades sehingga setiap biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
2. Melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam hal pengelolaan keuangan dengan menetapkan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan yang digunakan sesuai prosedur, mengurangi pemborosan atau harga yang kemahalan, serta pemantauan yang ketat dan transparan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. Melakukan perubahan perubahan dan penyesuaian-penyesaiaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru dan proses sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi praktek-praktek yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,. (2015). *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- BPKP, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim penyusun: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bintarto,R dan Surastopo Hadi Sumarno. 1991. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta : LP3ES.
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Fuad, Noor, dkk. (2004). *Dasar-dasar keuangan publik*. Jakarta: LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan keempat. Semarang: Undip.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria
- Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, edisi kedua, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, Eko Budi 2008, “*Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa*”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).
- Kaho, Yosef Riwu. 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Gravindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khusaini, Mohammad. (2006). *Ekonomi publik desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Levis, Leta Ravael, 2013, *Metode Penelitian Prilaku Petani*, Maumere, Ledalero.
- Hasniati, (2016). *Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Puspaga.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta
- Manulang. 1991, *Dasar - Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2006, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17
- Mulyana Budi. 2006. “*Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2006.
- Mulyadi, 2001. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Tiga Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Moedarlis, Trilaksana Fajar, 2016 *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurcholis, (2011). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 43/2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 dan PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang *Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*
- Pranarka, dan Priyono, Onny 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Belajar Praktis Analisis Parametrik dan Non Parametrik dengan SPSS*, cetakan pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Putriyanti Aprisiami., 2012., Penerapan Otonomi Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabuoaten Purworejo., Yogyakarta : UNY Arikunto Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Riyanto, (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- Sabarnpo, 2007. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press.
- Sakti, Daru, 2008, “*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyar Kab. Gorobongan, 2008*”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Subroto, Agus 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Tesis S-2 Pascasarjana UNDIP Semarang (dipublikasikan).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, gava media, Yogyakarta.
- Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sukesi,. (2007). *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.
- Waterston, Conyers (1994). *Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Era Otonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Widjaya, HAW. (2005). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT Rajawali Pers.